

PENDAMPINGAN ADMINSTRASI DAN PENGARSIPAN PADA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Zuni Silviana¹, Muhammad Roisul Basyar²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

silvianazuni@gmail.com, roisulbasyar@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan magang merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik kerja nyata di instansi pemerintahan. Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi dan pengarsipan pada Bagian Sumber Daya Manusia di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Metode yang digunakan meliputi observasi, praktik kerja langsung, dan penyusunan laporan kegiatan. Mahasiswa terlibat dalam proses verifikasi kuitansi perjalanan dinas sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), penyusunan daftar nominatif, serta pengarsipan dokumen keuangan dan administrasi lainnya. Hasil dari kegiatan magang menunjukkan bahwa proses administrasi di Bawaslu RI telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan keuangan negara. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata mengenai tata kelola administrasi publik yang baik serta pentingnya ketelitian dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulannya, magang di Bawaslu RI memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan profesional mahasiswa di bidang administrasi publik.

Kata kunci : Administrasi publik, pengarsipan, akuntabilitas, transparansi, Bawaslu RI

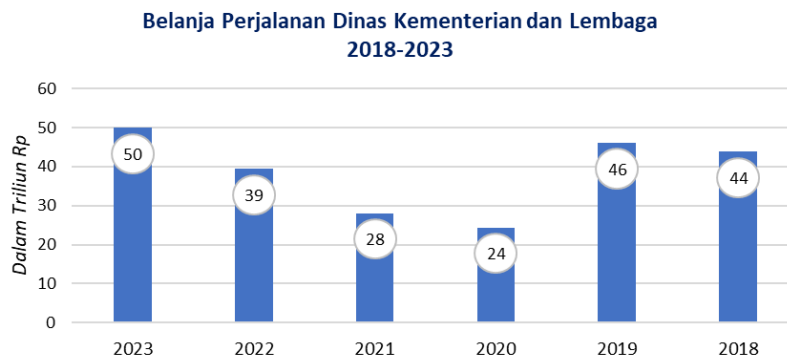
ABSTRACT

An internship is a form of learning implementation that provides students with the opportunity to apply theory to real-world work practices in government agencies. The purpose of this internship is to provide administrative and archiving assistance to the Human Resources Division of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu RI). The methods used include observation, hands-on work practice, and the preparation of activity reports. Students are involved in the process of verifying official travel receipts in accordance with the Input Cost Standard (SBM), compiling nominative lists, and archiving financial and other administrative documents. The results of the internship indicate that the administrative processes at Bawaslu RI have implemented the principles of transparency and accountability in accordance with state financial regulations. Through this activity, students gain real-world experience in good public administration and the importance of accuracy and integrity in carrying out their duties. In conclusion, the internship at Bawaslu RI provides significant benefits in improving students' academic competence and professional skills in the field of public administration.

Keywords : Public administration, archiving, accountability, transparency, Bawaslu RI

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur keuangan negara dengan cara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu cara dalam mengelola keuangan ini terlihat melalui kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun pejabat publik. Perjalanan dinas biasanya bertujuan untuk melaksanakan resmi di luar kantor, baik di dalam maupun di luar daerah, berdasarkan kebutuhan organisasi. Selama proses ini, setiap perjalanan dinas menimbulkan pengeluaran yang harus dilaporkan sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut ini adalah gambar grafik belanja perjalanan dinas Kementerian dan Lembaga pada tahun 2018-2023.



Gambar 1. Belanja Perjalanan Dinas Kementerian dan Lembaga 2018-2023

Sumber: BPK, LKPP K/L 2021-2023, diolah Fitra

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dijelaskan bahwa Standar Biaya Masukan (SBM) merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu Keluaran. Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi terutama terkait dengan satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas pegawai/non pegawai, besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, pemerintah berharap seluruh kementerian dan lembaga dapat menyusun anggaran secara lebih terukur, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penerapan Standar Biaya Masukan ini juga diharapkan mendorong tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Selain itu, penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dalam perjalanan dinas sangat penting untuk memastikan keadilan dan keseragaman dalam menggunakan anggaran di semua instansi pemerintah. Setiap pengeluaran yang terkait dalam perjalanan dinas, seperti biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian, harus mengikuti standar biaya yang telah ditentukan. Dengan adanya standar ini, proses penganggaran dan pelaporan menjadi lebih mudah, serta dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran, biaya yang ditambahkan secara tidak wajar, dan praktik maladministrasi lainnya (Keuangan, 2024).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebagai lembaga negara yang memiliki tugas penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, pastinya sering melakukan perjalanan dinas. Hal ini berkaitan dengan berbagai aktivitas yang meliputi pengawasan, koordinasi, dan pembinaan yang melibatkan banyak pihak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan administratif untuk perjalanan dinas menjadi sangat

penting untuk memastikan bahwa setiap biaya pengeluaran sesuai dengan ketentuan (Developer, 2024). Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Pedoman ini menjadi acuan bagi pengelola anggaran dan pelaksana perjalanan dinas agar penggunaan anggaran berlangsung transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mencegah penyimpangan dan mewujudkan tertib administrasi anggaran (Piyo, 2023)

[illegible]

Gambar 2. Kuitansi Perjalanan Dinas di Bawaslu RI

Sumber: *Bawaslu RI, diolah Zuni*

Salah satu instrument yang dipakai untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah kuitansi. Kuitansi ini berfungsi sebagai bukti resmi atas pengeluaran yang perlu diperiksa dengan peraturan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses pemeriksaan kuitansi bertujuan untuk memastikan bahwa bukti pengeluaran telah sesuai dengan standar biaya yang ada, tidak melebihi batas yang ditentukan, dan memenuhi syarat administrasi yang lengkap. Dengan demikian, proses pemeriksaan kuitansi perjalanan dinas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari pengawasan internal yang mendukung tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*) (Kotabumi, 2022).

Melalui kegiatan magang di Bawaslu RI, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses verifikasi kuitansi perjalanan dinas. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang cara mekanisme verifikasi dilakukan, jenis dokumen pendukung yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis memilih judul artikel “PENDAMPINGAN ADMINISTRASI DAN PENGARSIPAN PADA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA”.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. Lembaga Bawaslu RI ini terletak di JL. M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kegiatan magang dilaksanakan

selama 40 hari kerja sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025. Metode yang digunakan penulis untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan magang di Bawaslu RI, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan survey langsung di Lembaga Bawaslu RI.

2. Praktik kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan agar peserta magang mampu menerapkan ilmu administrasi publik yang di peroleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan khususnya bertujuan untuk mempelajari manajemen tata kelola yang dilakukan oleh Bawaslu RI, sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Maka dari itu, dalam kegiatan magang harus ada keaktifan dari peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi atau perusahaan dan universitas.

3. Penyusunan Laporan

Setelah akhir periode magang, peserta magang akan diwajibkan untuk menyusun laporan luaran magang dan luaran lainnya guna memenuhi seluruh persyaratan magang yang telah disepakati oleh pihak kampus dan prodi masing-masing untuk mendapatkan nilai dari hasil kegiatan magang.

HASIL dan PEMBAHASAN

Selama melaksanakan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), penulis memperoleh berbagai pengalaman dan keterampilan baru yang sangat bermanfaat. Kegiatan utama yang dilakukan adalah membantu proses verifikasi kuitansi perjalanan dinas sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). Dari kegiatan ini, penulis memahami bagaimana mekanisme verifikasi dilakukan mulai dari memeriksa kelengkapan dokumen, menghitung nominal yang tercantum, hingga mencocokkan dengan standar biaya yang berlaku. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan administrasi lainnya, seperti mengarsipkan dokumen, menyiapkan daftar nominatif perjalanan dinas, melakukan fotokopi dan scan dokumen, serta membantu distribusi berkas ke bagian terkait.

Pengalaman ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana tata kelola administrasi keuangan di lembaga pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penulis juga mendapatkan pemahaman bahwa setiap pengeluaran harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, hasil yang dicapai dari kegiatan magang ini bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai pentingnya integritas dan ketelitian dalam bekerja di instansi pemerintahan.



Gambar 1. Rapat sosialisasi

Gambar 2. Memferivikasi kuitansi

Gambar 3. Nominatif

Berdasarkan pengalaman magang yang dilakukan, penulis dapat menganalisis bahwa kegiatan magang di Bawaslu RI memberikan banyak manfaat baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, penulis dapat menghubungkan teori administrasi negara yang dipelajari di kampus dengan praktik nyata di lapangan. Misalnya, konsep akuntabilitas dan transparansi yang sering dibahas dalam perkuliahan ternyata benar-benar diterapkan dalam pengelolaan administrasi perjalanan dinas.

Menurut Joanne V. (2017:99) Transparansi adalah prinsip dan praktik keterbukaan serta akuntabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat diakses oleh publik atau pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk memantau, menilai, dan memahami berbagai tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu entitas. Dengan transparansi, kepercayaan dapat dibangun dan dipertahankan karena semua proses dan hasil dapat diakses dan dievaluasi secara objektif.

Dalam konteks pelayanan publik, transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dimensi transparansi dapat dibedakan dalam beberapa aspek kunci berikut:

a. Transparansi Informasi

Transparansi informasi adalah fondasi dari keterbukaan dalam pelayanan publik, di mana informasi yang relevan dan penting harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini mencakup aksesibilitas yang memadai melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web resmi, media sosial, dan papan pengumuman di tempat umum. Informasi yang diberikan harus lengkap dan jelas, mencakup rincian tentang prosedur pelayanan, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian.

b. Transparansi Proses

Transparansi proses menekankan pada keterbukaan dalam semua tahapan pengambilan keputusan publik, dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Proses ini harus dapat dipantau oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan dasar pertimbangannya.

c. Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan adalah elemen kritis dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran oleh lembaga atau instansi pemerintah. Setiap penggunaan

anggaran harus dilaporkan secara terbuka dan rinci, mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, serta rincian pengeluaran untuk berbagai kegiatan dan proyek. Laporan keuangan ini harus disusun secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apakah penggunaan tersebut sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui.

Menurut Joanne V. (2017:116) Akuntabilitas adalah konsep dan praktik di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut kepada pihak yang relevan. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas, tepat, dan jujur mengenai bagaimana dan mengapa keputusan tertentu diambil, serta dampak dari keputusan tersebut. Dalam konteks organisasi, ini berarti bahwa manajemen dan staf harus siap untuk diaudit dan dinilai oleh pihak internal dan eksternal guna memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik bertindak demi kepentingan masyarakat dan menggunakan sumber daya milik publik dengan cara yang efektif dan efisien. Ini mencakup berbagai mekanisme seperti audit, pelaporan kepada publik, dan pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif atau masyarakat itu sendiri. Dalam dunia pemerintahan, akuntabilitas sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, lembaga pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya dengan memastikan bahwa setiap instansi publik menjalankan tugasnya secara etis, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, akuntabilitas menjadi landasan utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang berkontribusi pada terwujudnya kepercayaan publik, keterbukaan, dan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.

Adapun dari sisi praktis, pelaksanaan magang melatih penulis untuk lebih teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap dokumen yang diperiksa harus sesuai dengan ketentuan, karena kesalahan kecil dapat berpengaruh pada laporan keuangan negara. Selain itu, magang juga melatih kemampuan kerja sama tim, karena hampir semua pekerjaan dilakukan dengan koordinasi bersama pegawai Bawaslu RI. Hal ini menunjukkan bahwa selain keterampilan teknis, soft skill seperti komunikasi, disiplin waktu, dan etika kerja juga sangat penting.

Secara keseluruhan, pelaksanaan magang di Bawaslu RI berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal. Penulis merasa mendapat banyak pengalaman berharga yang dapat menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, khususnya di bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Dari teori Donovan dan Jackson dalam T. Keban, (2008:54) menyebutkan bahwa administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Sedangkan pengertian publik itu sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu tetapi publik juga menunjuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah. Jadi administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami praktik administrasi

publik yang sesungguhnya. Melalui pendampingan administrasi dan pengarsipan, mahasiswa dapat mengamati secara langsung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada proses verifikasi kuitansi perjalanan dinas berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM). Selain keterampilan teknis, kegiatan ini juga melatih ketelitian, tanggung jawab, serta kemampuan kerja sama dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak instansi maupun bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang di masa mendatang. Bagi Bawaslu RI, diharapkan agar sistem administrasi dan pengarsipan dapat terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi digital, seperti sistem arsip berbasis komputer atau cloud, agar proses penyimpanan dan pencarian dokumen menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, kegiatan pelatihan bagi pegawai terkait Standar Biaya Masukan (SBM) juga perlu dilakukan secara berkala agar setiap staf memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan terbaru dan dapat meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

Developer. (2024). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban* | Bawaslu. <https://bolmut.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance* (Manado: Unsrat Press, 2017), Hlm. 99 dan 116.

Kuangan, K. (2024). *SBM 2025 Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri* – *kebijakankeuangan.com*. <https://kebijakankeuangan.com/2024/12/sbm-2025-uang-harian-representasi.html>

Kotabumi, K. (2022). *Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-umum/ketentuan-perjadin.html>

Piyo, S. (2023). *Kbawaslu No 237 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas* | PDF. <https://www.scribd.com/document/680685972/KBAWASLU-NO-237-TAHUN-2023-TENTANG-PEDOMAN-PELAKSANAAN-PERJALANAN-DINAS>